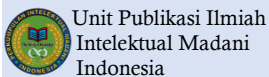


KOMUNIKASI POLITIK BERBASIS AL-QUR'AN: PREFERENSI PEMILIH MUSLIM DALAM PEMILU DI INDONESIA***POLITICAL COMMUNICATION BASED ON THE AL-QUR,AN: MUSLIM VOTERS' PREFERENCES IN INDONESIAN GENERAL ELECTION***

Muh. Resa Yudianto Suldani¹
Universitas Kebangsaan Republik Indonesia¹
Email:
yudiantoresa@gmail.com

Muh Amin²
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga²
Email:
aminpastell181100@gmail.com

IJI Publication
p-ISSN: 2774-1907
e-ISSN: 2774-1915
Vol. 5, No. 1, pp. 91-99
Nopember 2024



Abstrak: Bagi negara yang bercorak demokratis dan berpenduduk muslim terbesar di dunia, tentu tidak lepas dari proses politik dalam memilih pemimpin. Hal ini tentunya tidak lepas dari perlunya sistem politik yang baik dan perlu dilaksanakan untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak sistem negara. Islam memandang politik mempunyai kedudukan penting dalam bernegara. Karena itu umat muslim terlibat dan ikut andil dalam ranah politik khususnya dalam melakukan pemilihan terhadap pemimpin. Artikel ini bertujuan untuk membahas komunikasi dalam politik khususnya dalam sistem pemilu di Indonesia dalam perspektif Al-Qur'an. Dengan mengacu pada nilai-nilai Alqur'an dalam memilih pemimpin tentu menjadi poin penting bagi kaum muslim yang ada di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah analisis literatur dengan cara mengumpulkan data dari karya ilmiah yang telah diterbitkan seperti buku, jurnal, artikel dan tulisan lain yang mendukung tulisan ini. Komunikasi politik dalam perspektif Al-Qur'an cukup signifikan terhadap preferensi pemilih Muslim dalam Pemilu di Indonesia. Pesan-pesan politik yang mengutamakan nilai-nilai keislaman seperti keadilan, amanah, dan kejujuran cenderung menarik simpati pemilih yang berorientasi pada nilai-nilai keislaman. meski demikian, preferensi pemilih tidak sepenuhnya ditentukan oleh faktor agama, melainkan juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan strategi politik.

Kata Kunci: Al-Qur'an, Demokrasi, Politik, Komunikasi Politik

Abstract: As a democratic country and has the largest Muslim population in the world, it certainly cannot be separated from the political process in choosing leaders. This of course cannot be separated from the need for a good political system and needs to be implemented to avoid things that could damage the state system. Islam views politics as having an important position in the state. Because of this, Muslims are involved and take part in the political realm, especially in selecting leaders. This article aims to discuss communication in politics, especially in the electoral system in Indonesia from the perspective of the Koran. Referring to the values of the Koran in choosing leaders is certainly an important point for Muslims in Indonesia. The research method used in this paper is literature analysis by collecting data from published scientific works such as books, journals, articles and other writings that support this paper. Political communication from the perspective of the Qur'an is quite significant in the preferences of Muslim voters in elections in Indonesia. Political messages that prioritize Islamic values such as justice, trust and honesty tend to attract the sympathy of voters who are oriented towards Islamic values. However, voter preferences are not completely determined by religious factors, but are also influenced by social conditions, economics and political strategies.

Keywords: Al-Qur'an, Democracy, Politics, Political Communication.

PENDAHULUAN

Jumlah populasi penduduk Indonesia tahun berdasar survey Badan Pusat Statistik 2024 menyentuh angka 281.603,08 jiwa. Indonesia juga merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia sebagaimana laporan *The Royal Strategic Studi Centre (RISSC)* yang bertajuk *The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims 2024*, Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia. RISSC mencatat, jumlah populasi muslim di Indonesia mencapai 240,62 juta jiwa pada 2023. Jumlah ini setara 86,7% dari populasi nasional tahun

tersebut yang totalnya 277,53 juta jiwa (Cindy Mutiara Annur, 2023).

Negara yang besar dan umat muslim terbanyak di dunia tentu dibutuhkan pemimpin yang baik dan tidak lepas dari unsur politik. Pada era globalisasi sekarang ini, dua aspek tersebut tidak akan terlepas dari sebuah negara apalagi di Indonesia sebagai negara demokrasi tentu politik sangat kuat. Sebagai negara muslim terbesar di dunia tentu sistem politik yang baik perlu diterapkan untuk menghindari segala sesuatu yang dapat merusak sistem bernegara.

Ajaran Islam juga membahas masalah politik yang masuk dalam kajian *fiqh siyasah*

yaitu salah satu disiplin ilmu tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa hukum, peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan ajaran Islam. Al-Qur'an tidak menyatakan secara eksplisit bagaimana sistem politik itu muncul, tetapi menegaskan bahwa kekuasaan politik dijanjikan kepada orang-orang beriman dan beramal shaleh (Zamawi, 2015). Ini berarti kekuasaan politik terkait dengan kedua faktor tersebut. Di sisi lain politik juga terikat dengan ruang dan waktu.

Pada dasarnya ajaran Islam tidak hanya membahas persoalan agama saja, akan tetapi mencakup segala aspek kehidupan baik dalam kehidupan sosial, kesehatan, bernegara, berpolitik dan segala sesuatu yang ada di kehidupan. Hal inilah yang menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman utama umat muslim dalam kehidupan termasuk politik.

Jika melihat realita kontemporer kaum muslim, kita dapat melihat sebuah kenyataan yang sangat jauh berbeda dengan kondisi Islam pada masa sebelumnya. Perbedaan ini terwujud dalam "kemenangan" kekuatan sekularisme dalam pentas kehidupan sehari-hari. Interaksi kaum muslimin sendiripun sangat jauh berubah terhadap Islam setelah sebelumnya memiliki kekuatan yang nyaris sempurna terhadap perilaku individu dan masyarakat, kini bisa dikatakan bahwa kekuatan peran agama nyaris tidak melewati batas individu saja kecuali jika ingin megecualikan beberapa kalangan masyarakat Islam, seperti bagian masyarakat yang ada di Jazirah Arab misalnya, yang memiliki tingkat kepatuhan dan pengaruh pada Islam yang tidak sama satu dengan yang lain.

Dalam komunikasi politik tentu diperlukan nilai-nilai yang baik terutama bagi pelaku politik itu sendiri. Untuk melahirkan politik yang baik dan berkualitas tentu kita memerlukan pegangan agar politik tidak lari dari nilai-nilai yang baik. Dengan mengacu pada Al-Qur'an menjadi alternatif dalam

menerapkan sistem politik yang baik, sebab jika mengacu pada Al-Qur'an tentu nilai-nilai kebaikan bisa di dapatkan di dalamnya. Situasi politik sekarang ini sudah tidak melihat nilai-nilai yang sesuai dengan Al-Qur'an karena banyak dari pelaku politik hanya megutamakan kepentingan pribadi yang dapat merusak nilai kebaikan dan tidak sesuai dengan Al-Qur'an.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni *desk literature* atau *desk research* dimana data yang diperoleh bersumber dari data sekunder atau didasarkan pada materi/teori yang telah diterbitkan dalam sebuah laporan dan dokumen serupa yang tersedia di perpustakaan, situs web, data hasil survey, dan lain-lain. Makna dalam penelitian ini merujuk pada penggunaan data yang telah ada sebelumnya. Data yang ada kemudian dikumpulkan dan diringkas untuk meningkatkan efektifitas keseluruhan dari penyelidikan.

Desk literature atau *desk research* kerap kali disebut sebagai penelitian dokumenter atau penelitian sekunder, hal ini tidak terlepas dari jenis data yang dianalisis. Penelitian ini umumnya mengumpulkan data melalui berbagai sumber, antara lain data yang dapat di akses melalui internet, data dari lembaga pemerintah dan non-pemerintah, perpustakaan umum, dan bahkan arsip-arsip dokumen terkait hal atau topik yang sedang di teliti.

HASIL DAN DISKUSI

Komunikasi Politik

Politik, seperti komunikasi, adalah sebuah proses; dan seperti komunikasi, politik melibatkan pembicaraan ini bukan pembicaraan dalam arti sempit seperti kata yang diucapkan, melainkan pembicaraan dalam arti yang lebih inklusif, yang berarti segala cara orang bertkar simbol, kata-kata yang dituliskan dan diucapkan, gambar,

gerakan, sikap tubuh, perangai, dan pakaian. Ilmuwan politik Mark Roelofs mengatakan dengan cara sederhana, “Politik adalah pembicaraan; atau lebih tepat, kegiatan politik (berpolitik) adalah berbicara. Ia menekankan bahwa politik tidak hanya pembicaraan, juga tidak semua pembicaraan adalah politik (Nimmo, 2000).

a. Komunikasi

Komunikasi sangat penting bagi manusia, semakin luas hubungan maka semakin besar tugas, peran dan tanggung jawab sosial tersebut. Semakin seseorang terlibat dalam proses komunikasi, maka akan mempengaruhi dirinya dan perilakunya, karena pada hakikatnya adalah proses mengirim dan menerima simbol-simbol (pesan) yang mengandung makna antara medium dan medium, dengan tujuan pemahaman yang sama dalam arti dan untuk bersama. Komunikasi juga merupakan kebutuhan fitrah manusia, karena merupakan prasyarat perkembangan kehidupan setiap individu. (Roudhonah, 2019).

Proses komunikasi dimulai dalam skala kecil, yakni tingkat kepuasan kebutuhan primer yaitu minum, makan, dan lain sebagainya, kemudian bergerak ke skala yang lebih besar. Semakin banyak orang maju dan berkembang, semakin kompleks dan kompleks suatu masalah komunikasi. Perkembangan tingkat berpikir juga sangat mempengaruhi sifat, bentuk dan simbol pengguna komunikasi. Manusia di sisi lain, tidak lagi terikat atau institusi yang lebih luas (Soemarno AP, 2004).

b. Politik

Politik adalah sesuatu yang tidak lepas dari lingkungan makhluk sosial. Politik berada di semua lingkungan hidup sosial. Merasa atau tidaknya, suka atau tidak, politik juga berpengaruh besar di kehidupan, baik individu atau bagian dari kumpulan masyarakat. Berlanjut dari lahir sampai mati terlepas bagaimana kita dipengaruhi oleh proses politik atau tidak, dikarenakan politik sangat

berpengaruh di kehidupan setiap makhluk sosial, Aristoteles pernah menyatakan bahwasanya politik merupakan *master of science*. Gelar tersebut bukanlah tujuan ilmu, tetapi Aristoteles percaya bahwa pengetahuan politik adalah kunci untuk memahami lingkungan. Politik eksistensi makhluk sosial merupakan hal penting karena dapat mempengaruhi lingkungan kehidupan manusia yang lebih luas. Konsep politik di bagi dari lima bagian, 1. Politik diartikan sebagai usaha bersama, 2. Politik dijadikan entitas yang berhubungan untuk menjalankan negeri dan pemerintahan, 3. Politik diartikan sebagai semua tindakan yang ditujukan dalam memecahkan dan melindungi semua kepentingan publik, 4. Politik digunakan untuk acara, dikaitkan dengan formulasi dan penyelenggara ketentuan publik, 5. Politik diartikan dengan kekacauan untuk menemukan dan membudidayakan sumber daya yang berharga (Surabakti, 2007).

Pemimpin dan wakil rakyat atau kelompok kepentingan dalam mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan tertentu senantiasa menggunakan komunikasi, misalnya dalam menyampaikan rekomendasi terhadap kebijaksanaan yang akan diterapkan. Begitu pula cara penguasa atau pemerintah dalam menentukan opini publik akan menganalisis terlebih dahulu berbagai informasi yang berasal dari masyarakat, demikian juga para legislator dalam hal membahas suatu produk hukum sangat memerlukan komunikasi terlebih dahulu dengan segala komponen yang terkait terhadap produk legislatif itu. Singkatnya komunikasi mempunyai peran penting dalam proses politik, oleh karena itu tidak jarang bagi penguasa untuk mengendalikan atau mengawasi komunikasi agar mereka tetap mendapat dukungan untuk berkuasa.

Dalam hal ini tentu etika dalam berkomunikasi perlu di terapkan agar penyampaian pesan tidak menimbulkan

kontroversi dikalangan publik. Dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang menyinggung soal etika dalam berkomunikasi diantaranya pada surah An Nisa ayat 63:

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا

Artinya: Mereka itulah orang-orang yang Allah ketahui apa yang ada di dalam hatinya. Oleh karena itu, berpalinglah dari mereka, nasihatilah mereka, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya (Kemenag RI, 1994).

Ayat di atas menjelaskan tentang bagaimana seseorang dalam berkomunikasi dengan baik agar pesan yang di sampaikan diterima dengan baik. Sehingga diksi atau rangkaian kalimat yang disampaikan penutur dapat mempengaruhi seseorang ataupun khalayak yang menjadi target pesan. Dalam hal ini pemimpin atau wakil yang rakyat sebagai pengambil keputusan dalam merancang atau membuat suatu produk hukum tentu melihat efek pada penyampaian pesan apakah pesan yang disampaikan kepada publik tidak menimbulkan kontroversi atas pesan yang disampaikan.

Polik Dalam Islam

Sebagai agama yang rahmatan lil alamin (menyeluruh), Islam tidak hanya memutuskan perhatian pada permasalahan ibadah dan hukum saja, melainkan juga mencakup segala aspek kehidupan manusia seperti pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan bahkan politik yang merupakan bagian integral dalam Islam. Namun, penting untuk diketahui bahwa konsep politik dalam Islam memiliki perbedaan mendasar dengan politik yang dikenal dalam konteks modern seperti politik demokrasi dan sistem politik lainnya yang dibuat manusia.

Politik tidaklah sebatas persaingan kekuasaan. Dalam Islam, melainkan sebagai implementasi nilai-nilai Islam yang diatur oleh syariat. Politik islam didasarkan pada pesan al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman

terbaik yang diperoleh dari generasi awal Islam. Politik Islam menekankan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dalam menjalankan tugas-tugas politik (Hasbi Umar dkk., 2023).

Dalam Al-Qur'an juga ada ayat yang menyinggung masalah politik meskipun ayat tersebut tidak secara langsung menyebutkan kata politik salah satunya dalam surah At-Taubah ayat 7.

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: Bagaimana mungkin ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil Haram? Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya allah menyukai orang-orang yang bertakwa (Kemenag RI, 1994).

Dalam tafsir al-Jalalain yang dimaksud dengan masjidil Haram pada ayat di atas adalah pada hari Hudaibiyah, sedangkan yang dimaksud dalam kisah perjanjian ini adalah kafir Quraisy yang sejak lama menyembah berhala (Abdurrahman al-Jauzi, 2003).

Rasulullah Saw beserta kaum muslim melakukan hal tersebut. Perjanjian perdamaian dan gencatan senjata dengan penduduk Mekah ini berlangsung mulai dari bulan Zul Qa'dah tahun enam Hijriah hingga orang-orang Quraisy merusak perjanjian tersebut. Mereka dan para *hulafa-nya* (teman-teman sepaktanya) yaitu Bani Bakar bersekongkol untuk memerangi Bani Khuza'ah, teman sepakta Rasulullah Saw. Lalu mereka bersama teman sepaktanya membunuh orang-orang Bani Khuza'ah di Tanah Suci (Tafsir Ibnu Katsir & Terjemah Al Qur'an, Tafsir Al Qur'an, Ilmu Al Qur'an, Software Al Qur'an, Ebook Al Qur'an, Tilawah Al Qur'an, Murattal Al Qur'an, 2015).

Ayat ini mengandung unsur politik dalam konteks sejarah dan situasi politik pada masa Nabi Muhammad SAW di Makkah yang pada awalnya menghadapi tantangan dari orang musyrik yang secara aktif berusaha menghalangi dan melawan Islam. Allah telah memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan kaum mu'min untuk kukuh terhadap perjanjian mereka selama tidak melanggar aturan yang telah di sepakati berupa gencatan senjata dan tidak menampakkan permusuhan.

Dalam konteks politik, ayat ini membahas tentang perlunya menjaga dan memelihara perjanjian yang telah dibuat antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrik Makkah, jika mereka tidak melanggar perjanjian tersebut dan tetap memegang komitmennya, maka umat Islam juga harus mematuhi perjanjian tersebut dan tidak melanggarnya. Ayat ini memberikan legitimasi untuk bertindak secara tegas jika perjanjian dilanggar atau jika umat Islam dihadapkan pada ancaman yang serius dari pihak musuh.

Etika komunikasi bagi setiap orang sangat diperlukan, baik komunikasi dalam lingkungan sosial ataupun dalam ranah politik. Sama halnya dalam memilih pemimpin, etika komunikasi tentu menjadi hal yang tidak boleh diabaikan dan di pandang sebelah mata saja. Situasi pemilu di Indonesia menjadikan panggung bagi para calon pemimpin untuk mengkampanyekan kubunya khususnya pemilu di tahun 2024. Namun situasi menjelang pemilu tersebut ada beberapa calon pemimpin yang menyampaikan sesuatu sesuai dengan anjuran dalam Al-Qur'an yakni menyampaikan pesan agar orang-orang dapat menerima pesan tersebut dengan baik. Salah satu contoh yaitu capres no urut 2 yang memberikan statemen atau tanggapan yang kurang baik disampaikan (Intan Rakhmayanti Dewi, 2023).

Sistem Pemilu di Indonesia

Penyelenggaraan pemilu merupakan salah satu sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan yang berkedaulatan rakyat dan telah dilaksanakan 11 (sebelas) kali sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaan hingga Pemilihan Umum 2009. Keinginan untuk mengadakan Pemilu sudah menjadi obsesi atau keinginan bangsa Indonesia sejak kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Obsesi atau keinginan tersebut telah terealisasi melalui pemilihan umum yang telah diimplementasikan melalui mekanisme Undang-Undang yang mengatur tata cara pelaksanaan pemilihan umum, baik pemilihan umum legislative maupun pemilihan umum presiden (Agus Dedi, 2019).

Pemilu merupakan salah satu implementasi dari praktik demokrasi di Indonesia. Masyarakat sebagai warga negara ikut terlibat dalam menentukan arah dan figur kepemimpinan negara melalui proses politik yang dilaksanakan melalui pesta demokrasi tanah air. Secara fungsional, demokrasi diartikan sebagai nilai kehidupan yang baik (*good society*), sebagai pola interaksi sosial, dan sebagai kebijaksanaan publik hasil kompromi dari konflik atau interaksi kepentingan.

Kegiatan pemilihan umum (*general election*) juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat di mana rakyatlah yang berdaulat, maka semua aspek penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri pun harus juga dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah pelanggaran terhadap hak-hak asasi apabila pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilihan umum, memperlambat penyelenggaraan

pemilihan umum tanpa persetujuan para wakil rakyat, ataupun tidak melakukan apaapa sehingga pemilihan umum tidak terselenggara sebagaimana mestinya.

Dalam negara demokrasi, rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Kedaulatan merupakan kekuasaan dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik yang mencakup kebijakan publik dan keputusan yang berkaitan dengan penentuan pejabat publik yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kebijakan publik (Cholisin, 2009). Dalam konteks ini dapat dimaknai bahwa pemilu memiliki fungsi utama untuk menghasilkan proses politik yang benar-benar merupakan perwujudan kehendak rakyat. Oleh karena itu, pemilu merupakan salah satu sarana legitimasi kekuasaan dalam sistem demokrasi.

Salah satu manfaat dari pemilu adalah untuk menegakkan kedaulatan rakyat. Pemahaman tentang rakyat dalam kedaulatan rakyat berarti kekuasaan tertinggi ada pada rakyat dan menempatkan kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Ajaran kedaulatan rakyat sebagai ajaran yang terakhir dipraktekkan pada negara-negara modern mendapatkan tempat yang baik, karena ajaran kedaulatan rakyat dapat dianggap sebagai ajaran yang terbaik selain ajaran kedaulatan yang lainnya. Oleh karena, rakyat berdaulat atau berkuasa, maka segala aturan dan kekuasaan yang dijalankan oleh negara tidak boleh bertentangan dengan kehendak rakyat. Menurut ajaran ini, rakyat berdaulat dan berkuasa untuk menentukan bagaimana rakyat diperintah dalam rangka mencapai tujuan negara.

Pada tahun 2019 pemilu serentak dilakukan di Indonesia dengan menghadirkan lima pemillihan sekaligus, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi dan kabupaten/Kota, dan DPD RI. Sesuai dengan asas pemilu yang terdiri dari 6 poin yaitu, 1. Langsung, pemilih harus memberikan suara di Pemilu secara langsung. Suara tidak boleh melalui perantara atau

diwakilakan oleh siapapun. 2. Umum, setiap warga negara yang sudah mencapai usia 17 tahun atau telah menikah, memiliki hak entuk ikut meimilih tanpa adanya diskriminasi terkait suku, agama ras, golongan, jenis kelamin dan status sosial. 3. Bebas, dalam hal ini rakyat bebas memilih sesuai dengan hati nurani tanpa adanya paksaan, tekanan, ataupun pengaruh dari pihak manapun. 4. Rahasia, setiap elemen dalam penyelenggaraan pemilu harus bersikap jujur sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Mulai dari penyelenggara, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur. 6. Adil, setiap pemilih dan partai politik harus mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan. Dari semua poin yang ada tentu mempunyai tujuan untuk melibatkan rakyat secara aktif dalam pelaksanaan pemilu dan memilih pemimpin secara langsung. Dengan penduduk muslim terbanyak tentu membutuhkan pemimpin yang berkualitas dalam mengatur negara. Meskipun Indonesia merupakan negara dengan muslim terbesar bukan berarti pemimpin hanya memprioritaskan kaum muslim saja, akan tetapi kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia.

Dalam Al-Qur'an beberapa ayat menyebutkan tentang khalifah dan tentu umat muslim menjadikan acuan tersebut dalam memilih pemimpin. Salah satunya dalam surah Shad ayat 26:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena

mereka melupakan hari perhitungan (Kemenag RI, 1994).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Nabi Dawud a.s diangkat mejnadi khalifah dengan tugas menegakkan hukum dengan adil diantara manusia sekaligus melarang manusia mengikuti hawa nafsu. Larangan ini logis, karena kekuasaan dapat memperdaya manusia menjadi cinta kepada dunia dan meninggalkan perintah Allah. Oleh karena itu, kekhalifahan Dawud a.s disamping bertugas sebagai pengak hukum diantara manusia, juga sebagai penguasa yang mengelola wilayah tertentu atau dengan kata lain mempunyai kekuasaan politik. Hal ini diperolehnya berkat anugerah Ilahi yang mengajarkannya kepada al-hikmah dan ilmu pengetahuan.

Sedangkan dalam Tafsir al-Ibriz, Bisri Musthofa menyatakan “Wahai Nabi Dawud a.s! Sesungguhnya Aku (Allah) menjadikan kamu Khalifah di bumi (untuk mengurus urusan manusia), maka dari itu buatlah hukum diantara manusia dengan hukum yang Haqq (adil) dan janganlah menuruti hawa nafsu, karena hawa nafsu menyesatkan manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah (yaitu Iman kepada Allah) itu mereka akan siksa yang sangat pedih karena mereka lupa kepada Hari Hisab. Seandainya mereka tidak melupakan Hari Akhir, mereka pasti akan beriman ketika hidup di dunia.

Dalam ajaran Islam, memilih pemimpin merupakan suatu pilihan yang tidak boleh diabaikan. Beberapa ayat Al-Qur’an menyebutkan tentang memilih pemimpin. Seperti pada surah Ali Imran ayat 28:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya: Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai para wali dengan mengesampingkan orang-orang mukmin. Siapa yang melakukan itu, hal itu sama sekali bukan dari (ajaran) Allah, kecuali untuk menjaga diri dari sesuatu yang kamu

takuti dari mereka. Allah memperingatkan kamu tentang diri-Nya (siksa-Nya). Hanya kepada Allah tempat kembali (Kemenag RI, 1994).

Allah melarang kaum mukminin mengangkat kaum kafir sebagai orang-orang yang diutamakan dalam memberikan kecintaan dan pertolongan kepada mereka dengan tidak mempedulikan kaum Mukminin, barangsiapa menjadikan mereka sebagai orang-orang yang dijadikan loyalitas maka sungguh dia telah berlepas diri terhadap Allah, dan Allah juga berlepas diri terhadapnya, kecuali bila kalian berada dalam keadaan lemah lagi takut, maka sesungguhnya Allah memberikan kelonggaran bagi kalian untuk mengakhiri perdamaian dengan mereka untuk menghindari keburukan mereka, sampai perlindungan kalian menjadi kuat, dan Allah memperingatkan kalian dari diri Nya, maka bertakwalah kepada Nya dan takut kepada Nya, Dan hanya kepada Allah lah tempat kembali semua makhluk untuk menangani perhitungan amal dan penyelesaiannya (Tafsirweb, 2018).

Larangan itu tidak lain hanyalah untuk menjaga dan memelihara kemaslahatan agama, serta agar kaum Muslimin tidak terganggu dalam usahanya untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh agamanya. Adapun bentuk-bentuk persahabatan dan persetujuan kerja sama, yang kiranya dapat menjamin kemaslahatan orang-orang Islam tidaklah terlarang. Nabi sendiri pernah mengadakan perjanjian persahabatan dengan Bani Khuza'ah sedang mereka itu masih dalam kemusyrikan. Kemudian dinyatakan bahwa barang siapa menjadikan orang kafir sebagai penolongnya, dengan meninggalkan orang mukmin, dalam hal-hal yang memberi mudarat kepada agama, berarti dia telah melepaskan diri dari perwalian Allah, tidak taat kepada Allah dan tidak menolong agamanya.

Memilih pemimpin tentu menjadi suatu pilihan yang harus sesuai dengan ajaran Islam agar pemimpin yang kemudian terpilih dapat

mengemban amanah dengan baik dan tidak menjadikan jabatannya sebagai alat dalam memanfaatkan rakyat untuk kepentingan sendiri. Melalui pemilu yang dilaksanakan oleh negara, menjadikan seseorang dapat memilih pemimpin sesuai dengan hati nurani dan ajaran Islam.

KESIMPULAN

Hubungan yang kompleks antara agama Islam, politik, dan sistem pemilu di Indonesia. Islam tidak hanya dianggap sebagai agama ritual, melainkan juga sebagai panduan utama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik. Ajaran Islam mengajarkan tentang keadilan, kepemimpinan yang adil, dan tanggung jawab pemimpin terhadap umat. Komunikasi politik dalam konteks Islam ditekankan dengan nilai-nilai etika yang mencakup kejujuran, keadilan, dan kebenaran. Ayat-ayat Al-Qur'an memberikan pedoman dalam berkomunikasi, menekankan pentingnya menjaga kesucian pesan dan memastikan bahwa komunikasi tidak melenceng dari kebenaran.

Sistem pemilu di Indonesia, menjadi sarana implementasi demokrasi yang melibatkan partisipasi aktif rakyat. Prinsip-prinsip pemilu, seperti langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil, mencerminkan upaya untuk menciptakan proses politik yang transparan dan adil. Dalam konteks Islam, pemilihan pemimpin merupakan suatu tugas penting yang harus dilakukan sesuai dengan ajaran agama. Ayat-ayat Al-Qur'an menekankan pentingnya pemimpin yang bertaqwa, adil, dan memegang teguh prinsip kebenaran. Pentingnya menjaga integritas, keadilan, dan kebenaran dalam semua aspek kehidupan politik mencerminkan upaya untuk membangun masyarakat yang berdasarkan pada prinsip-prinsip agama.

Komunikasi politik dalam perspektif Al-Qur'an cukup signifikan terhadap preferensi pemilih Muslim dalam Pemilu di Indonesia. Pesan-pesan politik yang mengutamakan nilai-

nilai keislaman seperti keadilan, amanah, dan kejujuran cenderung menarik simpati pemilih yang berorientasi pada agama. Selain itu, kredibilitas tokoh politik serta media yang digunakan juga berperan penting dalam membangun kepercayaan dan menyampaikan pesan secara efektif. Meski demikian, preferensi pemilih tidak sepenuhnya ditentukan oleh faktor agama, melainkan juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan strategi politik lainnya.

REFERENSI

- Abdurrahman al-Jauzi. (t.t.). *Zad al-Masiyr fii 'Ilmi at-Tafsir*. Dar al-Kitab al-'Arabiy.
- Agus Dedi. (2019). ANALISIS SISTEM PEMILIHAN UMUM SERENTAK. *Jurna Moderat*, 5. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat>
- Cholisin. (2009). Mengembangkan Partisipasi Warga Negara dalam Memelihara dan Mengembangkan Sistem Politik Indonesia. *Jurnal Civics*, 6.
- Cindy Mutiara Annur. (2023, Oktober 19). 10 Negara dengan Populasi Muslim Terbanyak Dunia 2023, Indonesia Memimpin! *Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin#:~:text=Indonesia%3A%20240%2C62%20juta%20jiwa,Bangladesh%3A%20157%2C388%20juta%20jiwa>
- Hasbi Umar, Husain Bafadhal, & Achmad Husaini. (2023). *12 Ayat Al-Quran Tentang Politik Dalam Kitab Tafsir Al-Jalalain: Mengungkap Pesan-Pesan Politik Islam*. 6.
- Intan Rakhmayanti Dewi. (2018). *Viral "Ndasmu Etik" di Medsos, Dampaknya Nyata ke Prabowo*.
- Kemenag RI. (1994). *Al Qur'an dan Terjemahan* (cet I). PT. Kumudasmoro Grafindo.



Nimmo, D. (2000). *KOMUNIKASI POLITIK. Komunikasi, pesan, dan media* (7 ed.). PT REMAJA ROSDAKARYA.

Roudhonah. (2019). *ILMU KOMUNIKASI* (revisi). Rajawali Pers.

Soemarno AP. (2004). *Komunikasi Politik* (3 ed.). Universitas Terbuka.

Surabakti, R. (2007). *MEMAHAMI ILMU POLITIK* (cet 6). Pt Grasindo.

Tafsir Ibnu Katsir & Terjemah Al Qur'an, Tafsir Al Qur'an, Ilmu Al Qur'an, Software Al Qur'an, Ebook Al Qur'an, Tilawah Al Qur'an, Murattal Al Qur'an. (2015, Mei 24). *Tafsir Surat At-Taubah, ayat 7.*

Tafsirweb. (2018). *Surat Ali Imran Ayat 28.*

Zamawi, A. (2015). *POLITIK DALAM PANDANGAN ISLAM. V.*